

**Membongkar Wacana Pemberitaan Portal Berita Aceh atas
Isu Disintegrasi Spanyol**

Yuri Alfrin Aladdin^{1*}

¹Program Studi Ilmu Komunikasi - Universitas Bunda Mulia
Jl. Lodan Raya No. 2, Ancol, Jakarta – Indonesia

*Korespondensi: yaladdin@bundamulia.ac.id

Abstrak

Pemerintah wilayah otonom Catalonia, Spanyol, mengumumkan 90 persen dari 2,26 juta orang yang memberikan suara dalam referendum kemerdekaan pada 1 Oktober 2017, memilih untuk merdeka dari Spanyol. Jumlah itu mewakili sekitar 42,3 persen dari total pemilih Catalonia yang mencapai 5,34 juta. Situasi yang dialami Catalonia hampir mirip dengan Provinsi Aceh Darussalam yang pernah menuntut pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlawanan bersenjata di Aceh, tahun 1976 melalui organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), berakhir tahun 2005 setelah Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian Helsinki dengan GAM, dan menjadikan Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus dalam pangkuan NKRI. Studi ini membahas karakteristik pers di Aceh dikaitkan wacana pemisahan sebuah wilayah dari negara. Peneliti menggunakan metode Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough untuk menganalisis cara dan gaya pemberitaan media portal berita lokal Aceh, serta melakukan wawancara dengan dua orang pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan, masih terdapat wacana tersembunyi dukungan jurnalis muda media lokal Aceh terhadap ide kemerdekaan yang didorong oleh ketidakpuasan hasil pembangunan di Aceh.

Kata kunci: Catalonia, Spanyol, Aceh, Media lokal, Portal berita

Abstract

The Catalonia, Spain's autonomous region announced 90 percent of the 2.26 million people who voted in the independence referendum on October 1, 2017, to vote for independence from Spain. That number represents about 42.3 percent of Catalonia's total voters reaching 5.34 million. The situation experienced by Catalonia is almost similar to the Province of Aceh Darussalam which once demanded secession from the Unitary State of the Republic of Indonesia. Armed resistance in Aceh, 1976 through the Free Aceh Movement (GAM) organization, ended in 2005 after the Government of Indonesia signed a Helsinki agreement with GAM, and made Aceh a province with special autonomy in the lap of the NKRI. This study discusses the characteristics of the press in Aceh related to the discourse of separating a region from the country. The researcher used Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method to analyze the ways and styles of news coverage on local Acehnese news portals, as well as conduct interviews with two leaders of the Indonesian Journalists Association in Banda Aceh. The results of the study show that there is still a hidden discourse on the support of Acehnese local media young journalists on the idea of independence driven by dissatisfaction with the results of development in Aceh.

Keywords: Catalonia, Spain, Aceh, local media, news portal

Pendahuluan

Pemerintah regional negara bagian Catalonia yang merupakan bagian negara

Spanyol, mengumumkan 90 persen dari 2,26 juta orang memberikan suara dalam referendum kemerdekaan pada 1 Oktober 2017. Mereka

memilih untuk merdeka dari Spanyol. Jumlah itu mewakili sekitar 42,3 persen dari jumlah total pemilih Catalonia yang mencapai 5,34 juta.

Pejabat setempat mengatakan 770.000 suara hilang karena gangguan di tempat pemungutan suara oleh polisi Spanyol. Carles Puigdemont, pemimpin Catalan, mengumumkan dalam sebuah pernyataan di televisi bahwa Catalonia telah mendapatkan hak untuk menjadi negara merdeka dan hasilnya akan disahkan parlemen daerah dalam beberapa hari mendatang. "Dengan harapan dan penderitaan ini, warga Catalonia telah memenangkan hak atas negara merdeka dalam bentuk sebuah republik," kata Puigdemont, seperti dilansir Channel News Asia, 2 Oktober 2017. Dia juga mengatakan bahwa Uni Eropa tak bisa lagi terus mengabaikan hasil referendum Catalonia.

Pemerintah Spanyol menegaskan, surat suara tersebut tidak memiliki status hukum karena telah diblokir oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol yang memutuskannya bertentangan dengan konstitusi 1978. Pada hari Minggu siang, 1 Oktober 2017, Kementerian Dalam Negeri Spanyol mengatakan polisi menutup 79 dari 2.315 tempat pemungutan suara yang disiapkan untuk referendum tersebut. Pemerintah Catalan telah melaporkan bahwa, terlepas dari upaya tekanan aparat polisi, pemungutan suara berlangsung di 96 persen tempat pemungutan suara.

Sebelumnya, saat pemungutan suara berakhir, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengatakan bahwa rakyat Catalonia telah tertipu untuk mengambil bagian dalam pemungutan suara secara ilegal. Dia menyebutnya sebagai lelucon demokrasi. Pemerintah regional Catalonia, dengan Barcelona sebagai ibukotanya, memutuskan menggelar referendum untuk menanyakan pendapat publik apakah mereka setuju dengan opsi merdeka dari Spanyol.

Seperti dikutip dari situs *Tempo.co.*, Catalonia merupakan daerah yang kaya dengan pusat bisnis, keuangan, olah raga, dan seni. Mereka merasa berbeda dengan Spanyol, dan

ingin mengelola daerah mereka sendiri. Selain itu, pendapatan pajak yang cukup besar telah disetorkan kepada pemerintah pusat di Kota Madrid, ibukota Spanyol, dan kurang terasa efeknya bagi kesejahteraan warga Catalonia.

Wilayah Catalonia telah lama menjadi jantung industri Spanyol dan yang pertama untuk kekuatan maritim dan perdagangan barang seperti tekstil, keuangan, layanan dan perusahaan hi-tech. Catalonia adalah salah satu daerah terkaya di Spanyol, menyumbang 18,8 persen GDP Spanyol, dibandingkan dengan 17,6 persen dari Madrid. Dengan memisahkan diri akan menghasilkan produk domestik bruto sebesar US\$ 314 miliar menurut perhitungan oleh OECD. Fakta ini akan menjadikan ekonomi Catalonia terbesar ke-34 di dunia dan membuatnya lebih besar dari Portugal atau Hong Kong.

PDB per kapita akan menjadi US\$ 35.000 juga akan membuat Catalonia lebih kaya daripada Korea Selatan, Israel atau Italia. Dan kontribusi Catalonia terhadap ekonomi Spanyol dua kali lipat dari Skotlandia ke Inggris.

Situasi yang dialami Catalonia hampir mirip dengan salah satu provinsi di Indonesia yang rakyatnya pernah menuntut pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Aceh dan berhasil digagalkan pemerintah pusat. Namun perlawanan bersenjata rakyat Aceh kembali terjadi tahun 1976 melalui organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan berakhir tahun 2005 setelah pihak Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian Helsinki dengan GAM.

Aceh menjadi sebuah provinsi dengan otonomi khusus, namun tetap dalam pangkuan NKRI. Hal yang menarik pada studi ini adalah terkait dengan karakteristik pers di Aceh. Bagaimana karakteristik pers Aceh pascaperdamaian Helsinki? Apakah pers Aceh juga menyuarakan integrasi yang kuat dengan NKRI?

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Aceh pada tahun 2016 (berdasarkan data yang diinput tahun 2015) ternyata menempati

peringkat terbaik secara nasional (Tribunnews, 2017).

"Aceh jawara secara nasional dalam indeks kemerdekaan pers tahun 2016. Semoga prestasi ini bisa dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya," ungkap Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Perusahaan Pers Dewan Pers, Ratna Komala seperti dikutip Aceh Tribunnews.com. Ratna Komala menyampaikan hal itu pada Focus Group Discussion (FGD) Survei Indeks Kemerdekaan Pers di Aceh Tahun 2017. FGD ini dihadiri 12 informan lokal, tiga tim koordinator Aceh yang ditunjuk Dewan Pers, serta tiga staf yang diutus Dewan Pers ke Banda Aceh.

Dalam presentasinya, Ratna Komala menyatakan Dewan Pers telah memiliki data empirik dan data sekunder tentang kasus-kasus yang menghambat atau mengurangi kemerdekaan pers di berbagai provinsi, termasuk di Aceh.

Pendataan seperti itu dilakukan sejak 2015, 2016, dan tahun 2017. Dari data tahun 2015, akhirnya dilakukan pemeringkatan secara nasional dan IKP Aceh menempati peringkat tertinggi se-Indonesia (Tribunnews, 2017).

Sementara itu khusus media online, Lembaga Kajian IDEAS merilis perkembangan media-media online khususnya media lokal yang berbasis di Aceh. Setelah sebelumnya, pada Oktober 2015 lalu IDEAS sudah pernah merilis daftar 20 media online populer di Aceh pada 15 Maret 2016.

Saat ini, berbagai media online terus menyajikan akses informasi *up-to-date* bagi publik, terutama media yang berbasis di Aceh. Apalagi menjelang Pilkada Aceh 2017 yang lalu, banyak bermunculan situs portal berita online dan semakin mewarnai perkembangan atau pun persaingan media sebagai penyedia informasi bagi publik.

Dari jumlah 60-an lebih situs media online yang diakses IdeAS, lembaga ini menggunakan sistem pemeringkatan dari situs alexa.com untuk menganalisa lalu lintas atau *traffic* ke semua situs media online tersebut pada tanggal 15 Maret 2016. Peringkat daftar

situs media online ini dipublikasikan sebagai referensi publik terhadap perkembangan popularitas media, khususnya yang ada di Aceh berdasarkan traffic situs yang bisa diakses melalui sistem alexa.com.

"Khusus untuk situs aceh.tribunnews.com dan aceh.antaraneews.com, kami tidak memasukkan kedua situs lokal ini karena situs milik Serambi Indonesia dan Antara Aceh ini merupakan sub-domain dari situs berita nasional tribunnews.com dan antaraneews.com yang menduduki peringkat 7 dan 167 di Indonesia saat ini," demikian pemberitaan ideas-aceh.org.

Selanjutnya di urutan ke 21 – 50 besar urutan media online di Aceh di isi oleh: Pikiran Merdeka, Aceh Online, Aceh News, Status Aceh(net), Aceh Xpress, The Globe Journal, Juang News, Lintas Gayo, Harian Merdeka, Prohaba, Aceh Baru, Aceh Post, Bisnis Aceh, Atjehpress, Aceh Fokus, Inset Galus, Aceh Info, Leuser Antara, Warta Aceh, Modus Aceh, Jurnal Atjeh, Aceh Traffic, Radio Antero, Atjeh Link, Radar Aceh, Suara Tamiang, Aceh Lon, Global Aceh, Statusaceh (com), dan Kabar Aceh di urutan ke 50 berdasarkan traffic dunia versi alexa. (ideas-aceh.org).

Terkait dengan usaha pemisahan wilayah Catalonia, Spanyol, Studi ini bermaksud mengaitkan hal tersebut dengan pemberitaan isu tersebut pada media lokal di Provinsi Aceh. Dengan melihat cara dan gaya pemberitaan media lokal Aceh, peneliti bermaksud melihat wacana tersembunyi yang ada pada media-media lokal Aceh terhadap ide kemerdekaan dari sebuah wilayah terhadap negaranya. Dengan cara seperti ini, peneliti dapat melihat juga apakah ide disintegrasi masih bersemayam di media lokal Aceh, yang merupakan refleksi dari suara rakyat Aceh.

Penelitian ini bertujuan mencari wacana tersembunyi terkait isu pemisahan suatu wilayah terhadap negaranya melalui teks pemberitaan media online Aceh atas kasus referendum kemerdekaan wilayah Catalonia dari negara Spanyol. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ide pemisahan diri Aceh masih bersemayam dalam ideologi

media-media lokal Aceh, yang merupakan cerminan suara rakyat Aceh.

Kerangka Teori

Norman Fairclough mengemukakan, wacana merupakan sebuah praktik sosial dan membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi yaitu *text*, *discourse practice*, dan *sosial practice* (Eriyanto, 2001: 285). *Text* berhubungan dengan linguistik, misalnya dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat, juga koherensi dan kohesivitas, serta bagaimana antarsatuan tersebut membentuk suatu pengetahuan. *Discourse practice* merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks; misalnya, pola kerja, bagan kerja, dan rutinitas saat menghasilkan berita. *Sosial practice*, dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks; misalnya konteks situasi atau konteks dari media dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya politik tertentu.

Berdasarkan hal di atas, maka dirumuskanlah suatu pengertian analisis wacana yang bersifat kritis yaitu suatu pengkajian secara mendalam yang berusaha mengungkapkan kegiatan, pandangan, dan identitas berdasarkan bahasa yang digunakan dalam wacana. Analisis wacana menggunakan pendekatan kritis memperlihatkan keterpaduan: (a) analisis teks; (b) analisis proses, produksi, konsumsi, dan distribusi teks; serta (c) analisis sosiokultural yang berkembang di sekitar wacana itu.

Pendekatan Fairclough dalam menganalisa teks berusaha menyatukan tiga tradisi yaitu: (1) Analisis tekstual yang terinci di bidang linguistik; (2) Analisis makro-sosiologis praktik sosial (termasuk teori Fairclough, yang tidak menyediakan metodologi untuk teks-teks khusus); (3) Tradisi interpretatif dan mikro-sosiologis dalam sosiologi (termasuk etnometodologi dan analisa percakapan) dimana kehidupan sehari-hari diperlakukan sebagai produk tindakan seseorang.

Tindakan tersebut mengikuti sederet prosedur dan “kaidah akal sehat”. Model

Norman Fairclough (Eriyanto, 2001: 286) membagi analisis wacana kritis ke dalam tiga dimensi, yakni;

(1) Dimensi Tekstual (Mikrostruktural).

Setiap teks secara bersamaan memiliki tiga fungsi, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Fungsi representasi berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan untuk menampilkan realitas sosial ke dalam bentuk teks. Analisis dimensi teks meliputi bentuk-bentuk tradisional analisis linguistik – analisis kosa kata dan semantik, tata bahasa kalimat dan unit-unit lebih kecil, dan sistem suara (fonologi) dan sistem tulisan. Fairclough menadai pada semua itu sebagai ‘analisis linguistik’, walaupun hal itu menggunakan istilah dalam pandangan yang diperluas.

Ada beberapa bentuk atau sifat teks yang dapat dianalisis dalam membongkar makna melalui dimensi tekstual, diantaranya: (a) *Kohesi dan Koherensi*. Analisis ini ditujukan untuk menunjukkan cara klausa dibentuk hingga menjadi kalimat, dan cara kalimat dibentuk hingga membentuk satuan yang lebih besar. Jalinan dalam analisis ini dapat dilihat melalui penggunaan leksikal, pengulangan kata (repetisi), sinonim, antonim, kata ganti, kata hubung, dan lain-lain; (b) *Tata Bahasa*. Analisis tata bahasa merupakan bagian yang sangat penting dalam analisis wacana kritis. Analisis tata bahasa dalam analisis kritis lebih ditekankan pada sudut klausa yang terdapat dalam wacana. Klausa ini dianalisis dari sudut ketransitifan, tema, dan modalitasnya.

Ketransitifan dianalisis untuk mengetahui penggunaan verba yang mengonstruksi klausa apakah klausa aktif atau klausa pasif, dan bagaimana signifikasinya jika menggunakan nominalisasi. Penggunaan klausa aktif, pasif, atau nominalisasi ini berdampak pada pelaku, penegasan sebab, atau alasan-alasan pertanggungjawaban dan lainnya. Contoh penggunaan klausa aktif senantiasa menempatkan pelaku utama/subjek sebagai tema di awal klausa. Sementara itu, penempatan klausa pasif dihilangkan. Pemanfaatan bentuk nominalisasi juga mampu membiaskan baik pelaku maupun korban, bahkan keduanya; (c)

Diksi. Analisis yang dilakukan terhadap kata-kata kunci yang dipilih dan digunakan dalam teks. Selain itu dilihat juga metafora yang digunakan dalam teks tersebut. Pilihan kosakata yang dipaiki terutama berhubungan dengan bagaimana peristiwa, seseorang, kelompok, atau kegiatan tertentu dalam satu set tertentu. Kosakata ini akan sangat menentukan karena berhubungan dengan pertanyaan bagaimana realitas ditandakan dalam bahasa dan bagaimana bahasa pada akhirnya mengonstruksi realitas tertentu. Misalnya pemilihan penggunaan kata untuk miskin, tidak mampu, kurang mampu, marjinal, terpinggirkan, tertindas, dan lain-lain.

(2) **Dimensi Kewacanaan (Mesostruktural)**. Dimensi kedua yang dalam kerangka analisis wacana kritis Norman Fairclough ialah dimensi kewacanaan (*discourse practice*). Dalam analisis dimensi ini, penafsiran dilakukan terhadap pemrosesan wacana yang meliputi aspek penghasilan, penyebaran, dan penggunaan teks. Beberapa dari aspek-aspek itu memiliki karakter yang lebih institusi, sedangkan yang lain berupa proses-proses penggunaan dan penyebaran wacana. Berkenaan dengan proses-proses institusional, Fairclough merujuk rutinitas institusi seperti prosedur-prosedur editor yang dilibatkan dalam penghasilan teks-teks media.

Praktik wacana meliputi cara-cara para pekerja media memproduksi teks. Hal ini berkaitan dengan wartawan itu sendiri selaku pribadi; sifat jaringan kerja wartawan dengan sesama pekerja media lainnya; pola kerja media sebagai institusi, seperti cara meliput berita, menulis berita, sampai menjadi berita di dalam media. Fairclough mengemukakan bahwa analisis kewacanaan berfungsi untuk mengetahui proses produksi, penyebaran, dan penggunaan teks. Dengan demikian, ketiga tahapan tersebut mesti dilakukan dalam menganalisis dimensi kewacanaan.

(a) *Produksi Teks*. Pada tahap ini dianalisis pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi teks itu sendiri (siapa yang memproduksi teks). Analisis dilakukan terhadap pihak pada level terkecil hingga

bahkan dapat juga pada level kelembagaan pemilik modal. Contoh pada kasus wacana media perlu dilakukan analisis yang mendalam mengenai organisasi media itu sendiri (latar belakang wartawan redaktur, pimpinan media, pemilik modal, dan lain-lain). Hal ini mengingat kerja redaksi adalah kerja kolektif yang tiap bagian memiliki kepentingan dan organisasi yang berbeda-beda sehingga teks berita yang muncul sesungguhnya tidak lahir dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil negosiasi dalam ruang redaksi.

(b) *Penyebaran Teks*. Pada tahap ini dianalisis bagaimana dan media apa yang digunakan dalam penyebaran teks yang diproduksi sebelumnya. Apakah menggunakan media cetak atau elektronik, apakah media cetak koran, dan lain-lain. Perbedaan ini perlu dikaji karena memberikan dampak yang berbeda pada efek wacana itu sendiri mengingat setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Contoh: pada kasus wacana media wacana yang disebarkan melalui televisi dan koran memberi efek/dampak yang berbeda terhadap kekuatan teks itu sendiri. Televisi melengkapi dirinya dengan gambar dan suara, namun memiliki keterbatasan waktu. Sementara itu koran tidak memiliki kekuatan gambar dan suara, tapi memiliki kekekalan waktu yang lebih baik dibandingkan televisi.

(c) *Konsumsi Teks*. Dianalisis pihak-pihak yang menjadi sasaran penerima/pengonsumsi teks. Contoh pada kasus wacana media perlu dilakukan analisis yang mendalam mengenai siapa saja mengonsumsi media itu sendiri. setiap media pada umumnya telah menentukan “pangsa pasar”nya masing-masing.

(3) **Dimensi Praktis Sosial-Budaya (Makrostruktural)**. Dimensi ketiga adalah analisis praktik sosiobudaya media dalam analisis wacana kritis Norman Fairclough merupakan analisis tingkat makro yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang ada di luar media sesungguhnya memengaruhi bagaimana wacana yang ada ada dalam media.

Ruang redaksi atau wartawan bukanlah bidang atau ruang kosong yang steril, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar media itu sendiri. Praktik sosial-budaya menganalisis tiga hal yaitu ekonomi, politik (khususnya berkaitan dengan isu-isu kekuasaan dan ideologi) dan budaya (khususnya berkaitan dengan nilai dan identitas) yang juga mempengaruhi institusi media, dan wacananya.

Pembahasan praktik sosial budaya meliputi tiga tingkatan Tingkat situasional, berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya Tingkat institusional, berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun eksternal. Tingkat sosial, berkaitan dengan situasi yang lebih makro, seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Tiga level analisis *sociocultural practice* ini antara lain:

(a). Situasional. Setiap teks yang lahir pada umumnya lahir pada sebuah kondisi (lebih mengacu pada waktu) atau suasana khas dan unik. Atau dengan kata lain, aspek situasional lebih melihat konteks peristiwa yang terjadi saat berita dimuat.

(b). Institusional. Level ini melihat bagaimana persisnya sebuah pengaruh dari institusi organisasi pada praktik ketika sebuah wacana diproduksi. Institusi ini bisa berasal dari kekuatan institusional aparat dan pemerintah juga bisa dijadikan salah satu hal yang mempengaruhi isi sebuah teks.

(c). Sosial. Aspek sosial melihat lebih pada aspek mikro seperti sistem ekonomi, sistem politik, atau sistem budaya masyarakat keseluruhan. Dengan demikian, melalui analisis wacana model ini, kita dapat mengetahui inti sebuah teks dengan membongkar teks tersebut sampai ke hal-hal yang mendalam. Ternyata, sebuah teks pun mengandung ideologi tertentu yang dititipkan penulisnya agar masyarakat dapat mengikuti alur keinginan penulis teks tersebut.

Namun ketika melakukan analisis menggunakan model ini, harus berhati-hati jangan sampai apa yang dilakukan malah menimbulkan fitnah karena tidak berdasarkan sumber yang jelas.

Fairclough menawarkan empat langkah metode AWK (Haryatmoko, 2016: 23) Pertama, memfokuskan pada suatu 'ketidakberesan sosial' dalam aspek semiotiknya. Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani 'ketidakberesan sosial' itu. Ketiga mempertimbangkan apakah tatanan sosial itu 'membutuhkan' ketidakberesan sosial tersebut. Keempat, mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan itu.

Pertama, fokus pada 'ketidakberesan sosial' dalam aspek semiotiknya. Ketidakberesan sosial dipahami sebagai aspek-aspek sistem sosial, bentuk dan tatanan yang merugikan atau merusak kesejahteraan bersama yang bisa diperbaiki meski harus melalui perubahan-perubahan radikal dari sistem.

Ketidakberesan sosial itu meliputi kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi, kurangnya kebebasan atau rasisme. Pemahaman tentang ketidakberesan sosial juga sudah menjadi objek perdebatan, maka AWK memperhitungkan dalam adu argumen. Dua langkah dalam fokus ketidakberesan sosial ini yakni: (1) Memilih topik penelitian tentang ketidakberesan sosial yang dapat secara produktif didekati dengan pendekatan lintas ilmu dengan fokus relasi dialektik antara semiotika dan momen lain; (2) Mengkonstruksi objek penelitian dengan menteorisasi topik penelitian lintas ilmu.

Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani 'ketidakberesan sosial'. Pada tahap ini, pendekatan terhadap ketidakberesan sosial ditempuh dengan cara tidak langsung, yaitu dengan menanyakan cara bagaimana kehidupan sosial diorganisir dan distruktur sehingga mencegahnya dari upaya menanganinya. Hal itu butuh analisis tatanan sosial dan satu titik masuk ke analisis menjadi semiotik. Maka perlu menyeleksi dan menganalisis teks-teks yang relevan dan membahas hubungan dialektik antara semiosis dan unsur-unsur sosial lainnya.

Terdapat tiga tahap pada tingkat kedua ini yakni (1) analisis hubungan-hubungan

dialektik antara semiosis dan unsur-unsur sosial lainnya, antara tatanan wacana dan unsur-unsur praktik sosial lain, antara teks dan unsur-unsur kejadian; (2) menyeleksi teks dan memfokuskan pada analisis teks tersebut serta mengelompokkan sesuai dengan tujuannya untuk membentuk objek penelitian; (3) melakukan analisis teks, baik analisis interdiskursif maupun analisis linguistik dan semiotik.

Ketiga, mengidentifikasi apakah tatanan sosial membutuhkan 'ketidakberesan sosial'. Apakah ketidakberesan sosial melekat pada tatanan sosial, apakah dapat ditangani bila diubah. Ini adalah cara menghubungkan antara 'yang faktual' dan 'yang seharusnya': jika suatu tatanan sosial dapat ditunjukkan menghasilkan ketidakberesan sosial yang besar, maka menjadi alasan untuk memikirkan agar diubah. Hal ini terkait dengan masalah ideologi wacana selalu ideologis sejauh menyumbang untuk mendukung hubungan kekuasaan dan dominasi tertentu.

Keempat, mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan. Analisis pada tahap ini mau mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan dalam proses sosial yang ada untuk mengatasi hambatan-hambatan menangani ketidakberesan sosial.

AWK mau menganalisis bagaimana wacana memproduksi dominasi sosial, mendorong penyalahgunaan kekuasaan suatu kelompok terhadap yang lain dan bagaimana kelompok yang didominasi melalui wacana melawan penyalahgunaan kekuasaan.

Analisis ini membutuhkan pendekatan multidisiplin karena beragamnya aspek objek pengamatan. Selain itu objek tidak bisa lepas dari perspektif, posisi atau sikap kritis peneliti karena ilmuwan AWK memiliki komitmen sosio-politik untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, maka pendekatan multidisiplin ini mengandaikan penguasaan setidaknya ilmu linguistik dan ilmu-ilmu sosial. Ilmu linguistik membantu untuk menganalisis gramatika, semantik, *speech acts*, fonetik dan percakapan. Jadi pakar linguistik dan psikolog akan fokus ke

penggunaan bahasa dan pikiran yang tampak dalam interaksi wacana. Sedangkan untuk memahami dimensi makro AWK, wacana sebagai praksis sosial, ilmu-ilmu sosial membantu untuk mengamati serta menganalisis struktur sosial dan masalah ketidakadilan.

Dengan memperhitungkan proses semiosis itu, menurut Fairclough, AWK harus memerhatikan tiga dimensinya: teks, praktik diskursif dan praksis sosial budaya. *Pertama*, teks yaitu semua yang mengacu ke wicara, tulisan, grafik dan kombinasinya atau semua bentuk linguistik teks. *Kedua*, praktik diskursif, yaitu semua bentuk produksi dan konsumsi teks. Dalam dimensi ini ada proses menghubungkan produksi dan konsumsi teks atau sudah ada interpretasi. Fokus diarahkan pada cara pengarang teks mengambil wacana dan genre yang ada dengan memerhatikan bagaimana hubungan kekuasaan dimainkan. *Ketiga*, praksis sosial biasanya tertanam dalam tujuan, jaringan dan praksis budaya sosial yang luas.

Dalam dimensi ini, sudah mulai masuk pemahaman intertekstual, peristiwa sosial di mana kelihatan bahwa teks membentuk praksis sosial. Fairclough seperti dikutip Haryatmoko (2016: 24) menyebutkan, dalam analisis teks: *pertama*, hal mendasar yang perlu dianalisis adalah penggunaan perbendaharaan kata yang terkait dengan makna tertentu, penggunaan istilah dan metafora karena mau mengacu ke makna atau tindakan tertentu. Perbendaharaan kata meliputi makna kata: satu kata bisa mempunyai banyak makna dan makna berbeda tergantung dari konteksnya.

Kedua, analisis praktik diskursif mau melihat kekuatan pernyataan dalam arti sejauh mana mendorong tindakan atau kekuatan afirmatifnya. Dalam dimensi ini, akan dilihat koherensi teks-teks yang sudah masuk ke wilayah interpretasi. *Ketiga*, praksis sosial mau menggambarkan bagian aktivitas sosial dalam praksis, misalnya, menjalankan profesi (sebagai dokter, pelayan toko) selalu menggunakan bahasa khusus, demikian juga sebagai politisi ada kode sosial khusus. Suatu wacana berkelindan dengan berbagai

tingkatannya, dalam situasi langsung, dalam institusi atau organisasi yang lebih luas, dan pada tingkat masyarakat.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan paradigma kritis untuk menemukan wacana tersembunyi pada pemberitaan kasus referendum Catalonia pada media lokal Aceh. Penelitian ini akan dimulai dengan pemilihan subyek penelitian media lokal Aceh. Peneliti memilih dua media portal berita lokal Aceh yakni klikkabar.com dan portalsatu.com karena merupakan dua portal berita dengan jumlah pengunjung tertinggi merujuk pada hasil temuan lembaga pemantau pers Aceh IdeAS.

Pengumpulan berita-berita lempang dan *feature* dari media lokal Aceh terkait referendum kemerdekaan Catalonia dari negara Spanyol. Observasi dilakukan pada pemberitaan dengan kurun waktu selama satu bulan yakni 27 September – 28 Oktober 2017. Klikkabar.com selama kurun waktu satu bulan tersebut menampilkan tiga tulisan (berita lempang dan *feature*) terkait isu Catalonia.

Sementara itu, Portalsatu.com menampilkan lima tulisan (berita lempang dan *feature*) terkait isu Catalonia pada periode tersebut. Selanjutnya peneliti akan memilih masing-masing satu tulisan dari kedua media tersebut untuk dianalisis dengan menggunakan analisis wacana kritis model Fairclough.

Hasil Penelitian

Perbandingan Gerakan Catalonia dan Aceh. Gerakan disintegrasi rakyat Catalonia muncul akibat gelombang nasionalisme Spanyol. Nasionalisme tersebut tumbuh ketika parlemen Catalonia meloloskan undang-undang otonomi lebih luas pada 2006. Partai politik dan media Spanyol melancarkan kampanye anti-Catalonia. Sikap anti-Catalonia tersebut memaksa rakyat Catalonia pada tanggal 1 Oktober 2017 menggelar referendum dan hasilnya 90 persen warga negara Catalonia memilih pisah dari Spanyol.

Sama halnya dengan Catalonia, Aceh salah satu daerah otonom di Indonesia.

Perjuangan pemisahan diri provinsi ini dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah sangat lama. Pada tahun 1968 terjadi pemberontakan DII/TI. Perjuangan berikutnya lahir pada 1974 dipimpin seorang tokoh Aceh yaitu Tgk Muhammad Hasan Di Tiro.

Banyak korban meninggal dalam perang kurang lebih 30 tahun antara Tentara Nasional Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka hingga akhirnya sebuah bencana tsunami pada tahun 2004 menjadi jalan untuk berdamai. Perdamaian tersebut difasilitasi Uni Eropa. Hak otonomi Aceh diberikan dengan berbagai kesepakatan, seperti mendirikan partai politik lokal, adanya Wali Nanggroe, anggaran otonomi khusus.

Dalam masalah partai politik di Spanyol, partai lokal di Catalonia sangat mendominasi dan masyarakat Catalonia sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh partai lokal. Elit politik hadir bersama masyarakat dalam menuju sebuah tujuan kemerdekaan. Di sisi lain, Aceh mengalami kemunduran. Partai politik lokal di Aceh gagal menjawab harapan rakyat Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik. Berikut ini adalah hasil analisis dimensi tekstual dari *Berita Klikkabar.com*

Catalonia Deklarasikan Kemerdekaan dari Spanyol

28 Oktober 2017

KLICKABAR.COM – Parlemen Catalonia mengumumkan kemerdekaan dari Spanyol, Jumat, 27 Oktober 2017. Pengumuman ini bertentangan dengan pemerintah Spanyol, yang pada saat bersamaan bersiap untuk menerapkan peraturan langsung terhadap wilayah tersebut.

Meskipun deklarasi tersebut berlaku sebagai isyarat simbolis karena tidak akan diterima oleh Spanyol atau masyarakat internasional, pergerakan kedua belah pihak menciptakan krisis politik terburuk Spanyol dalam empat dekade ke tingkat yang baru.

Deklarasi yang disahkan oleh parlemen daerah di Barcelona ini mengatakan bahwa Catalonia merupakan negara

demokratis yang independen, berdaulat dan sosial. Pernyataan ini juga meminta negara dan institusi lain untuk mengakuinya. Meski begitu, deklarasi ini diboikot oleh partai-partai oposisi.

Parlemen Catalonia juga mengatakan ingin membuka pembicaraan dengan Madrid untuk berkolaborasi dalam mendirikan republik baru tersebut.

“Tidak akan mudah, itu tidak akan bebas, itu tidak akan berubah dalam sehari. Tapi tidak ada alternatif untuk proses menuju Republik Catalan,” ujar anggota dewan Marta Rovira dari Junts pel Si aliansi pro-kemerdekaan mengatakan dalam sebuah debat yang mengarah pada pemungutan suara seperti dikutip dari Reuters.

Setelah debat, anggota parlemen dari tiga partai nasional utama – Partai Rakyat, Sosialis dan Ciudadanos, memilih untuk keluar.

Anggota partai pro-kemerdekaan dan Podemos yang jauh tertinggal kemudian memilih 70-10 dalam sebuah pemungutan suara rahasia yang bertujuan menghalangi usaha pemerintah pusat untuk menjatuhkan tuntutan pidana kepada mereka.

Saham dan obligasi Spanyol dijual saat hasil pemungutan suara diumumkan.

Pemimpin Catalan Carles Puigdemont meninggalkan ruangan itu untuk teriakan “Presiden!”.

Sementara di Madrid majelis tinggi parlemen Spanyol, Senat, menyetujui Pasal 155 sebuah undang-undang yang mengizinkan pemerintah pusat untuk mengambil alih daerah otonom.

“Langkah-langkah luar biasa seharusnya hanya diadopsi jika tidak ada upaya lain yang mungkin dilakukan,” kata Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengatakan dalam sebuah pidato kepada Senat.

“Menurut saya tidak ada alternatif. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan dan yang harus dilakukan adalah menerima dan mematuhi hukum,” imbuhnya.

Ia juga mengatakan kepemimpinan Catalan telah mengabaikan undang-undang tersebut dan membuat olok-olok demokrasi.

“Kami menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah terakhir kami,” kata Rajoy, yang telah mempertaruhkan sebuah posisi tanpa

kompromi melawan kampanye Catalonia untuk melepaskan diri dari Spanyol.

Setelah pemilihan Senat, Rajoy diharapkan mengumpulkan kabinetnya guna mengadopsi langkah pertama untuk mengatur Catalonia secara langsung. Ini bisa termasuk pemecatan pemerintah Barcelona dan dengan asumsi pengawasan langsung pasukan polisi Catalan.

Tapi bagaimana aturan langsung bisa berjalan di lapangan, termasuk reaksi pegawai negeri dan polisi, tidak pasti.

Beberapa pendukung kemerdekaan telah berjanji untuk melakukan kampanye pembangkangan sipil, yang dapat menyebabkan konfrontasi langsung dengan aparat keamanan.

Krisis yang berkembang terjadi setelah referendum kemerdekaan pada 1 Oktober di mana dinyatakan ilegal oleh Madrid. Meskipun mendukung kemerdekaan, referendum hanya mendapatkan 43 persen pemilih karena orang-orang Catalan yang menentang kemerdekaan sebagian besar memboikotnya

Di Barcelona, kerumunan pendukung kemerdekaan membengkok di jalan-jalan di pusat kota, meneriakan “Liberty” dalam bahasa Catalan dan menyanyikan lagu-lagu Catalan tradisional.

“Saya khawatir, saya gugup seperti semua orang. Tapi kemerdekaan tidak pernah gratis,” kata musisi Jaume Moline (50).

Krisis ini juga telah mendorong penerbangan bisnis dari wilayah timur laut yang kaya raya dan menjadi alarm bagi para pemimpin Eropa yang khawatir jika krisis tersebut dapat menggerakkan sentimen separatistis di sekitar benua tersebut.

Catalonia adalah salah satu wilayah Spanyol yang paling makmur dan sudah memiliki tingkat otonomi yang tinggi. Tapi daerah itu juga memiliki banyak ketidakpuasan bersejarah, diperburuk selama kediktatoran Franco tahun 1939-1975, ketika budaya dan politiknya ditekan.**

<https://klikkabar.com/2017/10/28/catalonia-deklarasikan-kemerdekaan-dari-spanyol/>

Analisis Empat Langkah AWK Model Fairclough

Memfokuskan pada suatu ‘ketidakberesan sosial’. Alinea 1: Parlemen Catalonia mengumumkan kemerdekaan dari

Spanyol, Jumat, 27 Oktober 2017. Pengumuman ini bertentangan dengan pemerintah Spanyol, yang pada saat bersamaan bersiap untuk menerapkan peraturan langsung terhadap wilayah tersebut.

Analisis: Merujuk pada alinea tersebut, dapat dilihat bahwa ‘ketidakberesan sosial’ pada isu ini adalah adanya keinginan rakyat Catalonia untuk merdeka dari Kerajaan Spanyol. Setelah berpuluh tahun bergabung dengan Spanyol, rakyat Catalonia pun merasakan adanya ketidakadilan di bawah Spanyol, yaitu sebagian besar hasil kekayaannya harus diangkut untuk pemerintah pusat.

Karakteristik masyarakat Catalonia yang berbeda dengan masyarakat Spanyol umumnya juga menjadi dasar tuntutan Catalonia untuk melepaskan diri dari Spanyol. Portal berita Aceh Klikkabar.com mengambil berita ini dari kantor berita Inggris, *Reuters*. Namun demikian, pemilihan berita, penerjemahan dan sudut pengangkatan biasanya ditentukan oleh penyunting. Merujuk pada teras berita di atas, terlihat sekali bagaimana penyunting ingin menonjolkan peristiwa deklarasi kemerdekaan Catalonia.

Terdapat kesamaan sejarah antara Catalonia dengan Provinsi Aceh di masa Orde Lama hingga sebelum ditandatanganinya kesepakatan perdamaian Helsinki, yakni kedua daerah ini sama-sama berjuang untuk melepaskan diri. Perbedaannya adalah Catalonia berjuang melalui jalur diplomasi, sementara Aceh berjuang melalui jalur diplomasi dan senjata. Perbedaan lain yakni perjuangan rakyat Aceh untuk merdeka sudah selesai dengan ditandatanganinya kesepakatan Helsinki tahun 2005 yang menetapkan bahwa Aceh tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun dengan otonomi khusus yang diperluas.

Mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani ‘ketidakberesan sosial’:

Alinea 1: *Pengumuman ini bertentangan dengan pemerintah Spanyol, yang pada saat bersamaan bersiap untuk*

menerapkan peraturan langsung terhadap wilayah tersebut.

Alinea 2: *Meskipun deklarasi tersebut berlaku sebagai isyarat simbolis karena tidak akan diterima oleh Spanyol atau masyarakat internasional, pergerakan kedua belah pihak menciptakan krisis politik terburuk Spanyol dalam empat dekade ke tingkat yang baru.*

Analisis: Dua alinea tersebut menunjukkan bahwa keinginan untuk merdeka menghadapi hambatan dari Pemerintah Spanyol. Di alinea pertama dikatakan bahwa Pemerintah Spanyol telah bersiap untuk menerapkan peraturan langsung atau di bawah kendali langsung pemerintah pusat terhadap wilayah itu. Alinea kedua menyatakan bahwa deklarasi yang telah diumumkan pemerintah wilayah Catalonia sebenarnya hanya bersifat simbolis karena secara de facto wilayah Catalonia masih di dalam kendali negara Spanyol.

Tuntutan kemerdekaan Catalonia yang telah berlangsung selama empat dekade pada akhirnya telah menciptakan krisis terburuk yakni dengan adanya deklarasi kemerdekaan sepihak dari Catalonia. Penyunting Klikkabar.com nampaknya ingin menunjukkan bahwa nasib Catalonia sebetulnya tidak ubahnya dengan nasib Aceh, yakni tuntutan kemerdekaannya menghadapi hambatan dari pemerintah pusat di Jakarta.

Alinea 10-16: *“Sementara di Madrid majelis tinggi parlemen Spanyol, Senat, menyetujui Pasal 155 sebuah undang-undang yang mengizinkan pemerintah pusat untuk mengambil alih daerah otonom”.*

Langkah-langkah luar biasa seharusnya hanya diadopsi jika tidak ada upaya lain yang mungkin dilakukan,” kata Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengatakan dalam sebuah pidato kepada Senat.

“Menurut saya tidak ada alternatif. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan dan yang harus dilakukan adalah menerima dan mematuhi hukum,” imbuhnya.

Ia juga mengatakan kepemimpinan Catalan telah mengabaikan undang-undang tersebut dan membuat olok-olok demokrasi.

“Kami menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah terakhir kami,” kata Rajoy, yang telah mempertaruhkan sebuah posisi tanpa kompromi melawan kampanye Catalonia untuk melepaskan diri dari Spanyol.

Setelah pemilihan Senat, Rajoy diharapkan mengumpulkan kabinetnya guna mengadopsi langkah pertama untuk mengatur Catalonia secara langsung. Ini bisa termasuk pemecatan pemerintah Barcelona dan dengan asumsi pengawasan langsung pasukan polisi Catalan.

Tapi bagaimana aturan langsung bisa berjalan di lapangan, termasuk reaksi pegawai negeri dan polisi, tidak pasti.

Analisis: merujuk pada alinea-alinea tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Spanyol telah bersiap bertindak keras dan mengancam akan mengambil alih wilayah Catalonia sekaligus mencabut hak otonomi yang dimiliki daerah itu bila tetap ingin meneruskan perjuangan kemerdekaannya. Penyunting pun tampaknya ingin menunjukkan rasa simpati atas nasib Catalonia yang harus menghadapi ancaman pemerintah pusat, tidak ubahnya dengan nasib Aceh.

Mempertimbangkan apakah tatanan sosial ‘membutuhkan’ ketidakberesan sosial. Alinea 3: Deklarasi yang disahkan oleh parlemen daerah di Barcelona ini mengatakan bahwa bahwa Catalonia merupakan negara demokratis yang independen, berdaulat dan sosial. Pernyataan ini juga meminta negara dan institusi lain untuk mengakuinya. Meski begitu, deklarasi ini diboikot oleh partai-partai oposisi.

Alinea 21 dan 22: Montserrat Rectoret, seorang sejarawan berusia 61 tahun, mengatakan: “Saya emosional karena Catalonia telah berjuang selama 40 tahun untuk mandiri dan akhirnya saya dapat melihatnya.

”Krisis ini telah membelah Catalonia dan menyebabkan kebencian mendalam di

sekitar Spanyol – bendera nasional sekarang menggantung dari banyak balkon di ibukota dalam sebuah ekspresi kesatuan.

Analisis: keinginan Catalonia untuk lepas dari Spanyol merupakan suatu ‘ketidakberesan sosial’ di mata pemerintah pusat. Kendati apa yang dianggap ketidakberesan sosial itulah yang justru diimpikan rakyat Catalonia seperti dikutip di alinea 21, ketika seorang sejarawan Catalonia mengungkapkan emosi kegembiraannya setelah parlemen daerah mendeklarasikan kemerdekaan Catalonia, meskipun deklarasi tersebut masih bersikap simbolis dan sepihak.

Mengidentifikasi cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan. Alinea 4-5: Parlemen Catalonia juga mengatakan ingin membuka pembicaraan dengan Madrid untuk berkolaborasi dalam mendirikan republik baru tersebut.

“Tidak akan mudah, itu tidak akan bebas, itu tidak akan berubah dalam sehari. Tapi tidak ada alternatif untuk proses menuju Republik Catalan,” ujar anggota dewan Marta Rovira dari Junts pel Si aliansi pro-kemerdekaan mengatakan dalam sebuah debat yang mengarah pada pemungutan suara seperti dikutip dari Reuters.

Analisis: Menghadapi berbagai hambatan tersebut maka artikel berita lempang di atas juga menuliskan cara-cara menghadapi hambatan-hambatan tersebut, yakni pihak Parlemen Catalonia menawarkan perundingan damai dengan pemerintah Spanyol untuk menentukan nasib wilayah tersebut. Bahkan pada alinea lima dikutip pernyataan anggota parlemen Catalonia, Marta Rovira yang menganggap bahwa jalan menuju kemerdekaan memang tidak mudah dan tidak mungkin berubah dalam sehari.

Penyunting nampaknya juga terinspirasi dari melihat kesamaan nasib antara Aceh dan Catalonia. Organisasi perjuangan disintegrasi rakyat Aceh yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) juga berjuang untuk kemerdekaan sejak masa Orde Baru namun pada akhirnya perundingan antara pemerintah

pusat dan GAM menghasilkan kesepakatan perdamaian Helsinki tahun 2005.

Analisis Berita Portalsatu.com

Tak Gubris Seruan Spanyol, Catalonia Tetap Ingin Merdeka

17 October 2017 11:20 WIB

CATALONIA - Pemimpin [Catalonia](#), Carles Puigdemont, mengatakan akan tetap mempertahankan sikapnya untuk berpisah dari Spanyol sebagaimana hasil referendum awal Oktober dan keputusan perlemen pekan lalu. Warga Catalonia melakukan pemungutan suara berpisah dari Spanyol pada 1 Oktober 2017. Namun referendum tersebut berujung ricuh dan warga berhadapan dengan aparat keamanan.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy meminta pemimpin Catalonia tersebut memberikan jawaban atas suratnya yang dikirim pada Kamis pekan lalu mengenai keinginan berpisah dari Spanyol. Batas waktu diberikan pada Senin, 16 Oktober 2017, pukul 10.00 pagi waktu setempat. "Madrid akan menghapus otonomi Catalonia jika Puigdemont memilih berpisah," ucap Rajoy.

Dalam suratnya kepada Rajoy yang dimuat secara terbuka oleh media Catalan, Puigdemont tidak secara langsung menjawab pertanyaan Rajoy. Dia mengatakan bahwa harus ada pertemuan untuk melakukan dialog. "Kami bersedia berdialog meskipun ada kemungkinan banyak hal yang akan terjadi," kata Puigdemont di suratnya.

Di bagian suratnya Puigdemont juga menulis bahwa jutaan rakyat Catalan memberikan mandat kepada parlemen regional agar segera mendeklarasikan kemerdekaan. "Usulan kami untuk dialog itu tulus, terlepas dari semua yang telah terjadi, tapi secara logika tidak sesuai dengan iklim represi dan ancaman yang terus tumbuh," ujarnya.

Pengadilan konstitusi Spanyol memerintahkan agar referendum tersebut ditunda setelah hasilnya diumumkan kepada publik menyusul keberatan pemerintahan

Spanyol. Dalam konstitusi Spanyol pada 1978 disebutkan bahwa negara Spanyol tidak bisa dibagi dan memberikan kekuasaan kepada pemerintah nasional mengadakan referendum.

Analisis berdasarkan Empat Langkah Metode AWK Model Fairclough

(1) Memfokuskan pada suatu 'ketidakberesan sosial'. Alinea 1: *Pemimpin Catalonia*, Carles Puigdemont, mengatakan akan tetap mempertahankan sikapnya untuk berpisah dari Spanyol sebagaimana hasil referendum awal Oktober dan keputusan perlemen pekan lalu. Warga Catalonia melakukan pemungutan suara berpisah dari Spanyol pada 1 Oktober 2017. Namun referendum tersebut berujung ricuh dan warga berhadapan dengan aparat keamanan.

Analisis: 'Ketidakberesan sosial' yang terjadi yakni tindakan rakyat wilayah Catalonia untuk melakukan referendum dan memilih melepaskan diri dari negara Spanyol. Perjuangan disintegrasi selama empat dekade pada akhirnya memasuki suatu tahap baru, yakni tindakan referendum untuk menunjukkan legalitas bahwa rakyat Catalonia benar-benar tidak menginginkan 'hidup bersama' lagi dengan Spanyol, kendati referendum itu sendiri dianggap ilegal oleh pemerintah pusat Spanyol.

Meskipun berita ini aslinya diambil oleh portalsatu.com dari berita yang telah dibuat *Tempo.co* dan *Tempo* sendiri mengambil berita tersebut dari kantor-kantor berita asing, namun berita tersebut merupakan hasil seleksi yang ditentukan editor (penyunting) *Portalsatu.com* yang pastinya memperhatikan sudut pemberitaan (angle) yang diangkat. Tidak dapat dipungkiri kemungkinan pemilihan berita oleh redaksi atau penyunting yang bertugas, terkait dengan karakteristik situasi Catalonia yang hampir mirip dengan Aceh, yang juga sama-sama sebelumnya berjuang untuk melepaskan diri dari NKRI.

(2) Mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani 'ketidakberesan sosial' itu.

Alinea 2: *Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy* meminta pemimpin Catalonia

tersebut memberikan jawaban atas suratnya yang dikirim pada Kamis pekan lalu mengenai keinginan berpisah dari Spanyol. Batas waktu diberikan pada Senin, 16 Oktober 2017, pukul 10.00 pagi waktu setempat. "Madrid akan menghapus otonomi Catalonia jika Puigdemont memilih berpisah," ucap Rajov.

Alinea 5 : *Pengadilan konstitusi Spanyol memerintahkan agar referendum tersebut ditunda setelah hasilnya diumumkan kepada publik menyusul keberatan pemerintah Spanyol. Dalam konstitusi Spanyol pada 1978 disebutkan bahwa negara Spanyol tidak bisa dibagi dan memberikan kekuasaan kepada pemerintah nasional mengadakan referendum.*

'Ketidakberesan sosial' ini ternyata memiliki hambatan-hambatan tersendiri yakni adanya ancaman pemerintahan pusat Spanyol di Madrid yang mengancam untuk menghapus otonomi khusus Catalonia jika tetap memilih untuk berpisah. Hal tersebut dikaitkan dengan keputusan pengadilan konstitusi Spanyol yang memerintahkan agar hasil referendum ditunda pengumumannya karena referendum itu sendiri dianggap ilegal tanpa persetujuan pemerintah pusat.

Pemilihan berita ini oleh redaksi diperkirakan karena terdapat kesamaan dengan nasib Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menginginkan kemerdekaan Aceh namun gerakan tersebut dianggap ilegal oleh pemerintahan pusat di Jakarta dan selama masa Orde Baru ditumpas secara militeristik. Perbedaan yang ada antara gerakan kemerdekaan di Catalonia dan di Aceh yakni keinginan merdeka di Catalonia lebih banyak ditunjukkan melalui jalur diplomasi, bukan militeristik seperti di Aceh.

(3) Mempertimbangkan apakah tatanan sosial itu 'membutuhkan' ketidakberesan sosial tersebut.

Alinea 1: *Pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, mengatakan akan tetap mempertahankan sikapnya untuk berpisah dari Spanyol sebagaimana hasil referendum awal Oktober dan keputusan perlemen pekan lalu.*

Analisis: 'Ketidakberesan sosial' tersebut (keinginan melepaskan diri dari

Spanyol) memang dibutuhkan oleh masyarakat Catalonia yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat terkait dengan sedemikian besarnya hasil kekayaan Catalonia yang diangkut untuk Madrid. Pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, seperti dikutip kantor berita asing, mengatakan akan tetap mempertahankan sikapnya untuk berpisah dari Spanyol sebagaimana hasil referendum awal Oktober dan keputusan perlemen karena hal itulah yang dianggap merupakan pilihan rakyat Catalonia, tercermin melalui hasil referendum.

(4) Mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan itu

Alinea 3: *Dalam suratnya kepada Rajov yang dimuat secara terbuka oleh media Catalan, Puigdemont tidak secara langsung menjawab pertanyaan Rajov. Dia mengatakan bahwa harus ada pertemuan untuk melakukan dialog. "Kami bersedia berdialog meskipun ada kemungkinan banyak hal yang akan terjadi," kata Puigdemont di suratnya.*

Alinea 4: *Di bagian suratnya Puigdemont juga menulis bahwa jutaan rakyat Catalan memberikan mandat kepada parlemen regional agar segera mendeklarasikan kemerdekaan. "Usulan kami untuk dialog itu tulus, terlepas dari semua yang telah terjadi, tapi secara logika tidak sesuai dengan iklim represi dan ancaman yang terus tumbuh," ujarnya.*

Analisis: Solusi yang ditawarkan pemimpin Catalonia Puigdemont untuk membereskan 'ketidakberesan sosial' itu yakni kesediaan dirinya untuk berdialog dengan Madrid. Namun demikian, pada alinea berikut ditunjukkan bahwa meskipun Puigdemont menawarkan dialog perdamaian dengan pihak Madrid, namun dia menekankan juga bahwa dialog perdamaian itu ditawarkan di tengah iklim represi dan ancaman yang terus tumbuh sehingga hal tersebut dianggap merupakan pelanggaran terhadap demokrasi dan hak rakyat Catalonia untuk menentukan nasib tanah air mereka sendiri.

Pengambilan berita ini oleh redaksi portalsatu.com tentunya dapat dikaitkan dengan

nasib Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berjuang untuk kemerdekaan rakyat Aceh secara militeristik dan diplomasi namun pada akhirnya bersedia berdialog dan melepaskan keinginannya untuk merdeka, namun menerima kompensasi tetap dalam NKRI namun sebagai suatu provinsi yang memiliki hak otonomi diperluas, berbeda dengan beberapa provinsi lain di Indonesia yang juga memiliki hak otonomi khusus, seperti Yogyakarta dan Papua.

Analisa Struktur Meso: Praktik Wacana

Wawancara Saidulkarnain Ishak, 17 Desember 2017. Saidulkarnain adalah Wakil Ketua PWI Aceh Bidang Pendidikan periode 2005-2010.

Arah pemberitaan jurnalis Aceh saat ini lebih ke nuansa Islami. Terdapat kaukus jurnalis syariat yang mengembangkan pemberitaan berkarakter Islami. Agak jauh kemungkinan jika dikatakan pers Aceh secara keseluruhan memiliki ide untuk disintegrasi dari NKRI.

Bahwa ada temuan-temuan pemberitaan yang secara implisit cenderung mendukung disintegrasi lebih dimungkinkan karena alah personal dari para jurnalisnya, terutama jurnalis muda Aceh yang kurang mendapat pelatihan sehingga menulis sesuka-sukanya.

Pascareformasi, watak para jurnalis muda Aceh yang tidak terlatih dalam jurnalistik menunjukkan bahwa sering mereka tidak bisa membedakan mana opini dan berita. Harusnya mereka selalu mencari kebenaran atas informasi yang diterima. Mereka tidak pikirkan dampak atas pemberitaan. Hampir semua jurnalis muda Aceh berorientasi pada kuantitas berita, bukan kualitas.

Ketidakakurasian berita sering terlihat pada media online Aceh. Terdapat ribuan media online berita di Indonesia, namun yang kredibel bisa dihitung dengan jari. Secara keseluruhan, pers Aceh menginginkan kedamaian di Aceh dan kedamaian dalam aktifitas mereka sebagai jurnalis.

Memang diakui bahwa pasca-kesepakatan Helsinki masih ada ketidakpuasan

dari masyarakat Aceh atas tindak lanjut semua poin yang terkait pembangunan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pers Aceh mengkritisi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk hal-hal yang yang belum berjalan pada pembangunan di Aceh karena hal tersebut untuk kebaikan dan kenyamanan masyarakat Aceh. Isu utama yang masih dikritisi pers Aceh saat ini adalah pada masalah pembangunan infrastruktur.

Masyarakat umumnya menilai Gubernur Irwandy Yusuf sangat positif karena dia dianggap berhasil dalam masalah pembangunan kesehatan seperti penyelenggaraan jaminan kesehatan sehingga masyarakat dapat berobat gratis. Sementara itu, pada masa Gubernur Aceh Zaini Abdullah, dia dianggap berhasil dalam pengembangan bidang pendidikan, salah satunya dengan keberhasilan Zaini mengirim 200 orang pemuda Aceh kuliah program S1, S2 dan S3 di luar negeri.

Analisa Struktur Makro: Praktik Sosial Budaya Pers dan Masyarakat Aceh Terkait Isu Disintegrasi

Wawancara Heru Dwi Suryatmojo, 20 Desember 2017 di Jakarta. Heru Dwi adalah Ketua PWI Aceh Bidang Keagamaan Periode 2003 sampai sekarang.

Tidak melihat terdapat tanda-tanda adanya agenda media secara keseluruhan di Aceh yang masih menginginkan disintegrasi provinsi tersebut. Kalaupun ada secara implisit dapat dikatakan merupakan ulah jurnalis yang ingin membuat beritanya sensasional.

Masyarakat Aceh masih ada yang tidak puas terutama dari kalangan eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang merasa telah berjasa selama ini namun setelah para pemimpinnya menjadi pimpinan daerah di Aceh, nasib mereka tidak diperhatikan. Akhirnya banyak eks-kombatan ini yang kemudian terjun ke dunia kriminal demi mendapatkan uang.

Ketidakpuasan para eks-kombatan terutama terlihat saat pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah. Isu ketidakpuasan adalah pada besarnya anggaran APBD Aceh yang mencapai Rp20 triliun namun hasil-hasilnya tidak tepat

sasaran. Pemprov dianggap tidak fokus pada pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan eks-kombatan.

Pers Aceh pada saat ini telah bebas dalam membuat pemberitaan. Pers bebas mengeritik pemerintah pusat dan Pemprov Aceh.

Menjadi permasalahan adalah kualitas SDM jurnalis Aceh. Hanya sebagian media lokal Aceh yang menerima jurnalis sarjana. Media lokal umumnya tidak mengutamakan sarjana, lulusan SMA pun bisa jadi jurnalis.

Para jurnalis Aceh kebanyakan memiliki keterampilan jurnalistik berdasarkan otodidak, bukan melalui program pelatihan terstruktur. Untuk memecahkan masalah tersebut, pihak PWI Aceh kini banyak mengadakan pelatihan keterampilan jurnalistik terstruktur untuk para jurnalis lokal Aceh, terutama untuk kalangan muda. Dewan Pers juga telah menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Aceh dan lulusannya mendapat sertifikasi sesuai tingkat keterampilan, yakni jurnalis muda, madya, dan utama.

Peran Strategis Pers Lokal Aceh Terkait Isu Disintegrasi. Dalam proses reintegrasi, pers memiliki peran strategis yaitu untuk menginformasikan dan memperkuat usaha-usaha membangun tali silaturahmi di antaranmantan kombatan dan warga (korban konflik). Untuk itu, pers diharapkan mampu mentransformasikan peran mereka agar tidak sekadar sebagai pewarta informasi yang mengutamakan nilai konflik (Siti Zuhro pada Hamdan Basyar (ed): 2008: 96-101).

Konflik yang mengiringi proses reintegrasi, seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses resolusi konflik menuju perdamaian yang sejati. Oleh karena itu, pers diharapkan bisa berperan aktif ikut mendorong para pihak untuk membangun tali silaturahmi. Hal ini bukan berarti menuntut pihak pers atau jurnalis sebagai mediator. Namun, mereka diharapkan dapat memprovokasi para pihak yang terlibat dalam proses reintegrasi untuk mengedepankan upaya-upaya penyelesaian

konflik secara damai melalui fakta media (berita) yang mereka produksi.

Peran penting tersebut perlu dimainkan mengingat daya persuasi pemberitaan pers yang dipercaya ikut memperkuat pola pikir dan pola tindak seseorang. Untuk itu, perubahan perspektif dan keterampilan teknis untuk mengimplementasikan jurnalisme damai dalam meliput berbagai isu atau peristiwa yang muncul di Aceh, tidak terkecuali dalam meliput proses reintegrasi sangat diperlukan. Sebagaimana diakui oleh beberapa tokoh pers lokal Aceh, peran pers relatif signifikan dalam mendorong proses reintegrasi. Peran yang dimainkan pers sejauh ini adalah menyuarakan pentingnya perdamaian di Aceh, mendorong reintegrasi atau rekonsiliasi, mengedepankan berita-berita kepentingan kemanusiaan dan menjadi pengawas perdamaian.

Mengutip pendapat, Siti Zuhro, pers di Aceh perlu mengubah strateginya dari *spirit war journalism* ke *peace journalism*. Insan pers perlu menyadari pentingnya memiliki “tekad damai, berpikir damai, berkata damai dan bertindak damai. Di tengah proses reintegrasi yang kini sedang berlangsung, disadari atau tidak, ternyata pers memegang peran yang amat vital. Fengan kekuatannya mengolah dan menyebarkan informasi, masing-masing media, baik pers lokal, nasional maupun media internasional, telah memainkan peranan penting dalam mengungkap dan memberikan masukan dari berbagai tahapan proses tersebut.

Di tengah situasi dan kondisi Aceh sekarang ini, peran jurnalis yang profesional dan independen amat dibutuhkan. Untuk membangun kembali kondisi Aceh yang hancur akibat konflik dan bencana tsunami, memang harus melibatkan semua elemen dan komponen masyarakat, termasuk kalangan pers. Sebab, sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, pers menginginkan agar Aceh yang akan dibangun adalah Aceh yang bermartabat, damai, adil, makmur dan sejahtera.

Peran pers yang dipantau Siti Zuhro adalah sangat kooperatif dalam pencitraan perdamaian dan demokrasi lokal melalui

pemberitaan yang proporsional yang menggambarkan kepada publik nasional tentang stabilitas perdamaian dan demokrasi di Aceh yang tidak terlalu “memanas-manasi” tentang adanya elemen minoritas yang tidak puas dengan apa yang dicapai oleh Pemerintah Indonesia dan rakyat Aceh.

Kesimpulan

Dikaitkan dengan hasil wawancara dan temuan analisis wacana kritis Fairclough atas pemberitaan media lokal Aceh, *Klikkabar.com* dan *Portalsatu.com* menunjukkan bahwa ide disintegrasi Aceh diperkirakan masih ada di kalangan jurnalis muda, dipicu ketidakpuasan hasil pembangunan, walaupun hal tersebut tidak bisa dikatakan merupakan fenomena secara umum di kalangan pers lokal Aceh.

Kualitas SDM jurnalis Aceh masih terbatas. Hanya sebagian media lokal Aceh yang mempekerjakan wartawan sarjana dan kebanyakan wartawan di sana memiliki keterampilan secara otodidak sehingga tidak mengetahui efek media.

Pemerintah RI sebaiknya menaruh perhatian penting pada permasalahan masih adanya romantisme impian disintegrasi Aceh dari NKRI di kalangan jurnalis muda. Pemerintah dan organisasi pers juga harus memberi perhatian lebih pada peningkatan kualitas SDM jurnalis muda Aceh.

Daftar Pustaka

- Kawilarang, Harry. (2008). *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Yogyakarta: Bandar Publishing.
- Basyar, M. Hamdan, eds. (2008). *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*, P2P-LIPI. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse Analysis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKIS
- Tempo.co.id. Alasan Utama Catalonia Merdeka dari Spanyol. <https://dunia.tempo.co/read/1021315/3-alasan-utama-catalonia-merdeka-dari-spanyol#4ueS7EiilK62ups3.99>
- Aceh Tribunnews.com. Tahun Lalu Indeks Kemerdekaan Pers Aceh Terbaik se-Indonesia. (<http://aceh.tribunnews.com/2017/08/08/tahun-lalu-indeks-kemerdekaan-pers-aceh-terbaik-se-indonesia>)
- Klikkabar.com. Berikut 20 Media Online Terbaik di Aceh , Klikkabar Masuk Urutan Pertama. <http://klikkabar.com/2016/03/15/berikut-20-media-online-terbaik-di-aceh-klikkabar-masuk-urutan-pertama/>

Tabel 1. Peringkat Portal Berita di Aceh Berdasarkan Traffic

Peringkat Berdasarkan Traffic di Indonesia (IDeAS, 15 Maret 2016)

NO	ID	Media	Situs Online
1	1,354	Klik Kabar	http://klikkabar.com
2	1,860	Portal Satu	http://portalsatu.com
3	2,108	Media Aceh	www.mediaaceh.co
4	2,542	Harian Aceh	www.harianaceh.co.id
5	2,800	AJNN	www.ajnn.net
6	3,499	Atjeh Cyber	www.atjehcyber.net
7	3,532	Lintas Nasional	www.lintasnasional.com
8	4,781	Go Aceh	www.goaceh.co
9	6,950	Kanal Aceh	www.kanalaceh.com
10	7,498	Haba Daily	http://habadaily.com
11	7,666	Atjeh Post	http://atjehpost.com
12	9,094	Aceh Trend	www.acehtrend.co
13	10,759	Lintas Gayo	http://lintasgayo.co
14	10,312	Aceh Terkini	www.acehterkini.com
15	11,460	Seputar Aceh	www.seputaraceh.com
16	11,812	Berita Sore	http://beritasore.com
17	15,258	Aceh Online	http://acehonline.info
18	16,828	Lintas Atjeh	www.lintasatjeh.com
19	17,672	Juang News	www.juangnews.com
20	17,904	Aceh Merdeka Post	www.acehmerdekapost.com

*Daftar peringkat diurut berdasarkan traffic di situs alexa.com